



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD HIDAYAT NUR WAHID
2. Jabatan : WAKIL KETUA MPR RI
3. NHK : 35356

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 15.787.082.000**

1. Tanah Seluas 121 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 208.362.000
2. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 52 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , WARISAN Rp. 468.245.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/120 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 343.464.000
5. Tanah Seluas 68 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 117.096.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 876 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.258.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 532 m2/302 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.236.390.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 665 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.795.525.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 632.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CROWN SEDAN Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 82.000.000
2. MOBIL, TOYOTA HIACE MINIBUS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 500.070.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	3.326.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.699.498.160
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	30.945.150.160
III. HUTANG	Rp.	3.912.972.427
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	27.032.177.733

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.